

Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan melalui Pendekatan Holistik dan Integratif

Asep Amaludin^{1*}, Muhammad Rizqie Aris²

¹UIN Prof. K. H. Saifudin Zuhri Purwokerto, Purwokerto, Indonesia

²STEMBI Al-Aziziyah Randudongkal, Pemalang, Indonesia

Article Information

Received: July 30, 2025

Revised: October 5, 2025

Accepted: November 5, 2025

Published: December 18, 2025

Abstract

Community empowerment is a crucial strategy in sustainable development that emphasizes the integration of economic, social, and environmental dimensions. However, field practice still faces challenges such as program fragmentation, limited community participation, and a lack of integration across development aspects. This study aims to formulate a sustainable community empowerment management model using a literature review approach that examines theories, practices, and best practices from various scientific sources over the past ten years. The study's results indicate that sustainability-oriented empowerment must prioritize synergy between increasing community economic capacity, strengthening social cohesion, and preserving the environment. The proposed model emphasizes the importance of local culture and the use of technology as catalysts in accelerating transformation. This integration can produce a holistic, participatory, and adaptive management framework to global dynamics. This study concludes that the success of sustainable community empowerment is measured not only by economic growth but also by the development of collective awareness, social justice, and ecological sustainability. These findings are expected to provide theoretical contributions to the development of community empowerment management science, while also offering practical recommendations for governments, non-governmental organizations, and local communities in designing inclusive and sustainable development strategies.

Keywords: Community Empowerment, Sustainable Development, Social Management, Economic-Social-Environmental Integration, SDGs

Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi penting dalam pembangunan berkelanjutan yang menekankan keterpaduan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan berupa fragmentasi program, keterbatasan partisipasi masyarakat, serta kurangnya integrasi antar-aspek pembangunan. Penelitian ini bertujuan merumuskan pendekatan holistik dalam pemberdayaan masyarakat berkelanjutan, melalui studi literatur dengan mengkaji teori, praktik, dan best practices dari berbagai sumber ilmiah dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemberdayaan yang berorientasi pada keberlanjutan harus mengedepankan sinergi antara peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, penguatan kohesi sosial, dan pelestarian lingkungan hidup. Pendekatan yang diusulkan menekankan pentingnya peran budaya lokal dan pemanfaatan teknologi sebagai katalis dalam mempercepat transformasi. Integrasi ini mampu menghasilkan kerangka manajemen yang holistik, partisipatif, dan adaptif terhadap dinamika global. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat berkelanjutan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari terbangunnya kesadaran kolektif, keadilan sosial, serta keberlanjutan ekologi. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu pemberdayaan masyarakat, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal dalam merancang strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan, Manajemen Sosial, Integrasi Ekonomi-Sosial-Lingkungan, SDGs

*Author Correspondence: Asep Amaludin,

Copyright © 2025 Asep Amaludin, Muhammad Rizqie Aris

Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi penting dalam pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Konsep ini lahir dari kesadaran bahwa pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan *top-down* yang seragam, melainkan membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Pemberdayaan memberikan ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas, memperkuat kemandirian, dan menentukan arah pembangunan sesuai dengan potensi lokal. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, namun perlu mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan (Najamudin & Al Fajar, 2024). Integrasi ketiga aspek tersebut menjadi prasyarat tercapainya kesejahteraan yang berkeadilan dan berjangka panjang. Oleh karena itu, manajemen pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan bukan sekadar slogan, melainkan kebutuhan nyata untuk menjawab tantangan global maupun lokal.

Secara teoretis, pemberdayaan masyarakat berkelanjutan dapat dipahami melalui kerangka pembangunan holistik yang mengintegrasikan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Roseland, 2000). Teori pembangunan partisipatif menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahap, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Sementara itu, teori modal sosial menekankan pentingnya jaringan kepercayaan, norma, dan nilai yang mengikat masyarakat dalam kolaborasi kolektif. Ketika ketiga dimensi ini dikelola melalui

pendekatan manajerial yang sistematis, maka pemberdayaan akan menghasilkan dampak berlapis yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup. Namun, dalam banyak kasus, integrasi tersebut belum sepenuhnya terwujud karena manajemen masih terfokus pada aspek ekonomi semata. Hal ini mengindikasikan perlunya model baru yang dapat menggabungkan seluruh aspek pembangunan secara seimbang. Dengan demikian, pendekatan holistik berkelanjutan menjadi sangat relevan untuk dikaji.

Dalam praktiknya, berbagai program pemberdayaan masyarakat telah dilakukan baik oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun sektor swasta. Program-program tersebut mencakup peningkatan keterampilan usaha, pengembangan koperasi, perlindungan lingkungan, hingga penguatan peran perempuan dalam ekonomi lokal. Meski demikian, hasil yang dicapai masih beragam dan sering kali tidak konsisten dengan tujuan awal. Ada program yang berhasil meningkatkan pendapatan, tetapi gagal memperkuat solidaritas sosial atau menjaga kelestarian lingkungan. Sebaliknya, ada pula program yang mendorong partisipasi sosial, tetapi tidak memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendekatan parsial tidak cukup untuk menjawab kompleksitas masalah pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan holistik yang mampu mengintegrasikan ketiga dimensi secara bersamaan agar hasil yang dicapai lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Sejak disepakatinya SDGs pada tahun 2015, pembangunan berkelanjutan menjadi komitmen global, namun penerapan prinsip tersebut dalam praktik pemberdayaan masyarakat masih jauh dari harapan. Secara

normatif, pembangunan berkelanjutan harus mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, dalam praktik di lapangan, integrasi tersebut sering terabaikan karena fokus program cenderung lebih besar pada peningkatan pendapatan jangka pendek. Akibatnya, keberlanjutan sosial dan lingkungan kurang mendapat perhatian serius. Fenomena ini menunjukkan adanya gap antara idealisme konsep pembangunan berkelanjutan dengan realitas implementasi pemberdayaan. Tanpa manajemen yang jelas, program pemberdayaan berisiko hanya menjadi proyek sementara tanpa dampak jangka Panjang (Dzajuli, 2024). Oleh karena itu, penelitian pendekatan *holistic* dalam manajemen pemberdayaan masyarakat berkelanjutan sangat penting untuk mengatasi ketidaksesuaian ini.

Selain gap antara konsep dan praktik, terdapat pula kesenjangan antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan nyata masyarakat. Program pemberdayaan yang dirumuskan di tingkat pusat sering kali bersifat generik dan tidak mempertimbangkan keragaman konteks lokal. Padahal, setiap komunitas memiliki karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang berbeda. Ketidaksesuaian ini sering membuat program tidak efektif karena masyarakat merasa kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya, bantuan modal usaha diberikan tanpa mempertimbangkan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Akibatnya, program tidak hanya gagal meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga menimbulkan masalah baru bagi lingkungan. Hal ini memperlihatkan bahwa manajemen pemberdayaan harus berbasis pada kebutuhan lokal dan adaptif terhadap kondisi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat berkelanjutan seharusnya melibatkan kolaborasi multi-aktor yang mencakup pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil (Maulid et al., 2025). Namun, dalam kenyataannya, sinergi tersebut sering tidak berjalan dengan baik. Banyak program yang dijalankan secara sektoral tanpa koordinasi lintas lembaga, sehingga terjadi tumpang tindih dan pemborosan sumber daya. Selain itu, partisipasi masyarakat kadang masih bersifat formalitas, bukan keterlibatan substantif dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini melemahkan efektivitas program karena tidak ada kepemilikan bersama terhadap hasil yang dicapai. Kurangnya kolaborasi juga menghambat terciptanya inovasi dalam pemberdayaan. Fenomena ini menunjukkan perlunya model manajemen yang mampu membangun kerangka kerja kolaboratif yang inklusif, transparan, dan berorientasi jangka panjang.

Penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana pendekatan manajerial dapat digunakan untuk mengatasi kesenjangan antara konsep dan praktik, serta antara kebijakan dan kebutuhan lokal. Dengan memfokuskan pada integrasi multidimensi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh tentang mekanisme pemberdayaan yang efektif. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan program pemberdayaan dalam jangka panjang. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan teori pengembangan masyarakat, sekaligus kontribusi praktis dalam merancang strategi pemberdayaan di lapangan.

Secara lebih spesifik, penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, mendeskripsikan konsep dasar pemberdayaan masyarakat berkelanjutan yang terintegrasi. Kedua, menganalisis praktik manajemen pemberdayaan yang telah dilaksanakan, beserta kelemahan dan peluang perbaikannya. Ketiga, merumuskan pendekatan holistik yang mampu menjembatani kesenjangan antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan lokal. Keempat, memberikan rekomendasi strategis bagi pengambil kebijakan, lembaga swadaya masyarakat, dan pelaku komunitas agar dapat mengimplementasikan pemberdayaan secara berkelanjutan. Dari segi kontribusi, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur mengenai manajemen pembangunan partisipatif, serta memberikan referensi bagi perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga relevansi praktis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan, baik berupa buku, artikel jurnal, prosiding, maupun laporan penelitian terkait manajemen pemberdayaan masyarakat berkelanjutan (Rahmatullah et al., 2023). Fokus kajian diarahkan pada integrasi tiga dimensi utama pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Proses pengumpulan literatur dilakukan secara sistematis melalui basis data akademik internasional maupun nasional dengan kriteria publikasi lima hingga sepuluh tahun terakhir agar sesuai dengan

perkembangan kontemporer. Selain itu, penelitian juga mengkaji dokumen kebijakan, laporan lembaga internasional, serta praktik terbaik (*best practices*) dari berbagai kasus pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal maupun global.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*) yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, tren, serta kesenjangan dalam literatur yang ada. Data dari berbagai sumber kemudian disintesis untuk merumuskan model konseptual manajemen pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Validitas hasil kajian diperkuat dengan melakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari berbagai literatur agar diperoleh kesimpulan yang lebih komprehensif dan akurat. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis sekaligus praktis dalam mengembangkan kerangka manajemen pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Sumber literatur yang menjadi rujukan meliputi : Pertama tentang strategi pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan usaha, digitalisasi pemasaran, dan penguatan koperasi berbasis digital menjadi salah satu pendekatan yang relevan di era teknologi. Wulan Wati dkk. (2025) menegaskan bahwa pemanfaatan digital marketing dapat memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk anggota koperasi. Hal serupa diungkapkan oleh Naufal, Ngizudin, dan Rachdantia (2025) yang menekankan pentingnya penerapan digitalisasi koperasi dan pendampingan UMKM dalam meningkatkan value produk. Kedua penelitian tersebut menunjukkan

bahwa integrasi teknologi dalam sistem usaha masyarakat tidak hanya meningkatkan efisiensi pemasaran, tetapi juga memperkuat daya tahan ekonomi komunitas.

Kedua, peningkatan kapasitas kepemimpinan, model partisipatif, dan solidaritas sosial terbukti menjadi fondasi penting dalam pemberdayaan masyarakat. Kristiniati dan Choiriyah (2014) melalui kajiannya tentang program PNPM Mandiri menyoroti bahwa partisipasi masyarakat secara aktif berpengaruh langsung terhadap keberhasilan program. Rahmatullah, Kusmin, dan Hendrawan (2023) menambahkan bahwa modal sosial menjadi instrumen strategis dalam memperkuat jejaring dan keberlanjutan gerakan pemberdayaan. Sejalan dengan itu, Khotimah (2025) menekankan dinamika kepemimpinan partisipatif sebagai solusi untuk mengatasi fragmentasi sosial di lingkungan pesantren. Dengan demikian, keterlibatan aktif masyarakat dan kepemimpinan partisipatif berfungsi sebagai katalis dalam memperkuat kohesi sosial.

Ketiga aspek lingkungan juga tidak terlepas dari perhatian dalam literatur pemberdayaan masyarakat. Aqilla (2024) menekankan konsep ekonomi hijau yang tidak hanya berfokus pada penyelamatan bumi, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Wijayanti, Setianingsih, dan Misnan (2024) di Desa Ngale yang membuktikan bahwa usaha bersama komunitas dapat membangun kemandirian ekonomi lokal. Lebih lanjut, Yudha (2025) menegaskan bahwa pemberdayaan melalui program usaha mikro di Desa Maninjau mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat kesadaran konservasi. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa

keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian ekologi merupakan syarat penting bagi keberlanjutan pemberdayaan.

Keempat, integrasi kearifan lokal dalam program pemberdayaan juga menjadi sorotan. Jubaedah dan Fajarianto (2021) menunjukkan bagaimana pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal di Cirebon dapat menjadi strategi peningkatan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan identitas budaya. Pendekatan ini dipertegas oleh Najamudin dan Al Fajar (2024) yang mengedepankan metode Asset Based Community Development (ABCD) dalam pemanfaatan sumber daya lokal untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, kesesuaian program dengan tradisi dan nilai lokal terbukti meningkatkan efektivitas serta keberlanjutan pemberdayaan masyarakat.

Kelima, penguatan kapasitas digital melalui pelatihan dan inovasi teknologi lokal terbukti signifikan dalam mendorong kemandirian masyarakat. Tutupohoa dkk. (2024) menekankan bahwa digitalisasi dapat menjadi alat pemberdayaan ekonomi komunitas rural. Sementara itu, Mukhzamilah dkk. (2022) mengembangkan pelatihan berbasis mobile apps yang relevan untuk mendukung transformasi desa. Lebih lanjut, Amari'a dan Ulinuha (2023) melalui studi program "Sibakul Jogja" menunjukkan bagaimana digitalisasi pembinaan UMKM mampu mendorong transformasi kesejahteraan pelaku usaha. Secara keseluruhan, literatur ini menegaskan bahwa penguasaan teknologi digital dan inovasi lokal merupakan instrumen vital dalam memperluas akses informasi, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing komunitas di era modern.

Hasil

Kajian literatur menunjukkan bahwa konsep pemberdayaan masyarakat berkelanjutan menekankan integrasi tiga dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan (Sujianto et al., 2024). Literatur internasional dan nasional sepakat bahwa pemberdayaan yang hanya berfokus pada salah satu dimensi tidak mampu menjawab kompleksitas masalah masyarakat. Misalnya, pendekatan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek sosial sering menimbulkan kesenjangan baru, sementara yang mengabaikan aspek lingkungan dapat menyebabkan degradasi ekosistem.

Pada aspek ekonomi, hasil telaah literatur menegaskan bahwa pemberdayaan berbasis UMKM, koperasi, dan kewirausahaan sosial merupakan pilar penting untuk meningkatkan kemandirian finansial masyarakat (Penelitian et al., 2024). Namun, berbagai penelitian juga mencatat bahwa banyak program tidak berkelanjutan akibat lemahnya akses pasar, manajemen usaha, serta minimnya dukungan kebijakan.

Dalam dimensi sosial, literatur menunjukkan bahwa modal sosial berupa kepercayaan, solidaritas, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan pemberdayaan. Komunitas dengan jaringan sosial yang kuat lebih mampu mempertahankan keberlanjutan program. Akan tetapi, partisipasi masyarakat masih rendah, terutama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga program sering kali didominasi elite lokal.

Dimensi lingkungan dalam hasil kajian literatur menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara lestari (Aqilla, 2024). Program pemberdayaan yang

mengintegrasikan konservasi, pertanian organik, energi terbarukan, dan pengelolaan sampah terbukti mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menjaga ekosistem. Namun, tantangan yang muncul adalah rendahnya kesadaran lingkungan serta keterbatasan akses terhadap teknologi ramah lingkungan.

Secara umum, hasil studi literatur merumuskan bahwa pendekatan holistik dalam pemberdayaan masyarakat berkelanjutan menuntut adanya keterpaduan antar dimensi pembangunan (Mutmainah, 2024). Sinergi ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi landasan utama dalam merancang pendekatan yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Pembahasan

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kapasitas kepemimpinan lokal (Khotimah, 2025). Pemimpin komunitas yang memiliki visi, integritas, dan keterampilan manajerial mampu mendorong partisipasi masyarakat secara lebih aktif. Sebaliknya, kepemimpinan yang bersifat otoriter dan elitis justru memperlemah kepercayaan serta menghambat keberlanjutan program. Oleh karena itu, strategi pengembangan kepemimpinan berbasis komunitas perlu menjadi bagian integral dari model manajemen pemberdayaan.

Selain faktor kepemimpinan, kolaborasi multi-pihak (*multi-stakeholder collaboration*) juga menjadi elemen penting dalam pemberdayaan berkelanjutan (Baskhara et al., 2023). Hasil kajian literatur menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, sektor

swasta, dan masyarakat lokal menciptakan daya dukung yang lebih kuat dalam aspek pendanaan, teknologi, maupun jaringan pasar (Djazuli & Hidayat, 2024). Tanpa adanya kolaborasi, program pemberdayaan rentan stagnan karena keterbatasan sumber daya dan pengetahuan lokal.

Dalam konteks kebijakan publik, literatur memperlihatkan bahwa regulasi sering kali belum sepenuhnya mendukung praktik pemberdayaan berkelanjutan (Sodikin et al., 2025). Banyak kebijakan masih berorientasi jangka pendek dan cenderung sektoral, sehingga tidak mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara utuh. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara wacana pembangunan berkelanjutan dengan implementasi nyata di lapangan. Oleh karena itu, kerangka kebijakan perlu diarahkan untuk mendorong pendekatan holistik dan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat.

Teknologi dan inovasi menjadi faktor transformasi dalam pemberdayaan masyarakat di era modern (Naufal et al., 2025). Literatur menekankan bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat memperluas akses pasar bagi UMKM, memperkuat komunikasi komunitas, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya alam. Namun, kesenjangan digital masih menjadi hambatan signifikan, terutama di wilayah pedesaan dengan infrastruktur terbatas (Ali Tutupohoa, 2024). Dengan demikian, investasi pada literasi digital dan akses teknologi menjadi keharusan dalam mendukung keberlanjutan program pemberdayaan.

Di sisi sosial budaya, kajian literatur mengungkap bahwa nilai kearifan lokal memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan (Jubaedah & Fajarianto,

2021). Program yang sejalan dengan budaya dan tradisi setempat lebih mudah diterima masyarakat, sehingga memiliki daya tahan lebih lama. Sebaliknya, program yang mengabaikan nilai lokal sering kali mendapat resistensi. Oleh karena itu, integrasi kearifan lokal dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas pemberdayaan.

Aspek ekonomi juga tidak bisa diabaikan dalam pembahasan pemberdayaan berkelanjutan. Literatur menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui akses modal, penguatan UMKM, dan pelatihan kewirausahaan mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengurangi ketergantungan pada pihak luar (Yudha, 2025). Namun, penguatan ekonomi saja tidak cukup tanpa diimbangi dengan pembangunan kapasitas sosial dan kesadaran lingkungan, karena keberlanjutan membutuhkan keseimbangan antar dimensi.

Dari sisi sosial, partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan program. Kajian menunjukkan bahwa masyarakat yang dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi memiliki rasa memiliki yang lebih kuat terhadap program yang dijalankan (Kristiniati & Choiriyah, 2014). Hal ini menciptakan solidaritas sosial dan mengurangi potensi konflik internal. Partisipasi yang bersifat formalitas justru melemahkan keberlanjutan, sehingga model manajemen yang berbasis partisipatif menjadi sangat relevan.

Pada dimensi lingkungan, literatur menekankan pentingnya konservasi sumber daya alam sebagai bagian dari strategi pemberdayaan. Masyarakat yang diberdayakan tanpa kesadaran lingkungan cenderung mengeksploitasi sumber daya

secara berlebihan. Oleh karena itu, integrasi program konservasi dengan aktivitas ekonomi masyarakat seperti agroforestri, ekowisata, dan pertanian organik menjadi solusi yang

efektif untuk mencapai keseimbangan. Hal ini juga sejalan dengan agenda *global Sustainable Development Goals* (SDGs) (The United Nations Development Program, 2019).

bel 2. Ringkasan Faktor Keberhasilan, Tantangan, dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan

Dimensi	Faktor Keberhasilan	Tantangan Utama	Strategi Penguatan
Ekonomi	Akses modal, penguatan UMKM, pelatihan kewirausahaan	Keterbatasan pendanaan, akses pasar terbatas	Kemitraan usaha, digitalisasi pemasaran, koperasi berbasis komunitas
Sosial	Kepemimpinan lokal visioner, partisipasi aktif masyarakat	Dominasi elite lokal, partisipasi formalitas	Peningkatan kapasitas kepemimpinan, model partisipatif, penguatan solidaritas sosial
Lingkungan	Konservasi sumber daya alam, praktik agroforestri, ekowisata	Eksplorasi berlebihan, minim kesadaran lingkungan	Edukasi lingkungan, insentif ekonomi hijau, regulasi konservasi
Budaya	Integrasi kearifan lokal, kesesuaian program dengan tradisi	Resistensi budaya terhadap perubahan	Revitalisasi tradisi produktif, pendekatan budaya, partisipasi tokoh adat
Teknologi	Literasi digital, pemanfaatan teknologi informasi	Kesenjangan digital, keterbatasan infrastruktur	Pelatihan digital, pengembangan akses internet, inkubasi inovasi lokal

Secara praktis, berbagai tantangan pemberdayaan masyarakat berkelanjutan antara lain keterbatasan pendanaan, lemahnya literasi digital, dominasi elite lokal, serta resistensi budaya terhadap perubahan (Amari'a & Ulinuha, 2023). Literatur merekomendasikan perlunya strategi inovatif yang berbasis kebutuhan lokal, memperkuat sistem monitoring, serta melibatkan pihak eksternal untuk transfer pengetahuan dan teknologi. Dengan pendekatan adaptif, tantangan tersebut dapat diubah menjadi peluang untuk memperkuat kemandirian komunitas.

Secara konseptual, pembahasan literatur menyimpulkan bahwa model manajemen pemberdayaan masyarakat berkelanjutan harus berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang, bukan hanya hasil sesaat (Wijayanti Mala et al., 2024). Pendekatan ini menuntut keseimbangan antara peningkatan ekonomi, penguatan sosial, dan konservasi lingkungan. Dengan mengadopsi model integratif, pemberdayaan masyarakat dapat menjadi instrumen strategis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), sekaligus memastikan kualitas hidup yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Gambar 1. Pendekatan Holistik dalam Manajemen Pemberdayaan Masyarakat berkelanjutan

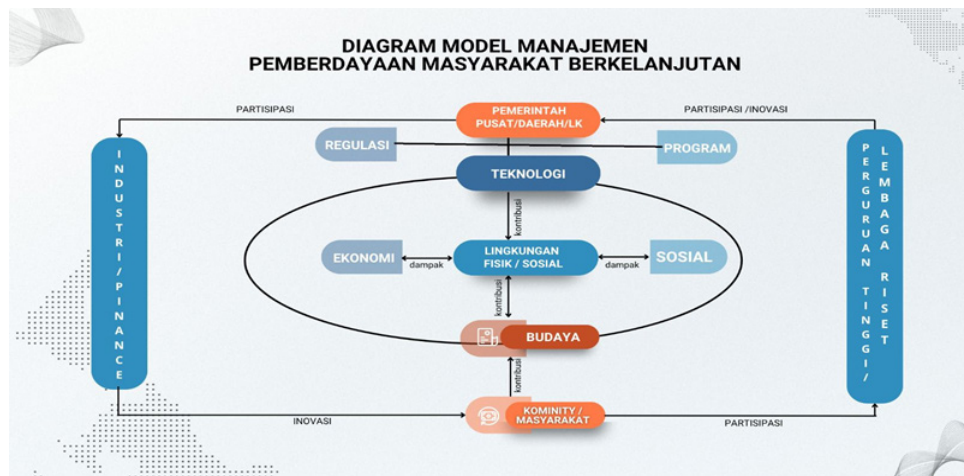


Diagram alir pendekatan holistik dalam manajemen pemberdayaan masyarakat berkelanjutan yang menekankan integrasi dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan dukungan budaya dan teknologi.

Integrasi antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pemberdayaan masyarakat tidak hanya sekadar idealisasi, tetapi menjadi keniscayaan dalam menghadapi kompleksitas tantangan global (Windasari et al., 2024). Misalnya, pengembangan ekonomi Melalui UMKM berbasis lokal tidak akan berkelanjutan jika tidak disertai dengan kesadaran sosial masyarakat dalam membangun solidaritas serta kepedulian terhadap lingkungan. Begitu pula, program konservasi lingkungan seperti agroforestri atau ekowisata akan gagal jika tidak memiliki dukungan ekonomi yang memadai serta partisipasi sosial yang kuat. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat harus dirancang sebagai sebuah ekosistem manajemen yang menyinergikan ketiga dimensi utama secara seimbang agar tidak menimbulkan trade-off yang merugikan.

Temuan literatur menunjukkan adanya sejumlah kesenjangan dalam praktik pemberdayaan yang berlangsung selama

ini. Tantangan yang muncul antara lain rendahnya literasi digital, keterbatasan akses permodalan, lemahnya kapasitas manajerial, dominasi elite lokal dalam pengambilan keputusan, serta minimnya kesadaran terhadap isu lingkungan (Mukhzamilah et al., 2022). Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, diperlukan strategi inovatif yang melibatkan multi-stakeholder, mengedepankan partisipasi masyarakat, dan memperkuat sistem monitoring serta evaluasi yang berorientasi pada dampak jangka panjang.

Selain itu, faktor budaya dan teknologi berperan sebagai akselerator dalam memperkuat manajemen pemberdayaan masyarakat. Budaya lokal menjadi fondasi penerimaan program karena masyarakat lebih mudah menerima inovasi yang selaras dengan tradisi dan nilai mereka. Di sisi lain, teknologi menjadi katalis dalam memperluas dampak, misalnya melalui digitalisasi pemasaran, penyediaan platform pelatihan daring, atau penerapan teknologi ramah lingkungan (Wulan et al., 2025). Integrasi keduanya memberikan arah baru dalam pembangunan berkelanjutan: berbasis kearifan lokal namun adaptif terhadap modernitas. Dengan demikian,

model manajemen pemberdayaan masyarakat berkelanjutan dapat dipandang sebagai sebuah pendekatan holistik yang menggabungkan nilai tradisional, potensi ekonomi, solidaritas sosial, kepedulian lingkungan, serta pemanfaatan teknologi.

Simpulan

Berdasarkan kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa manajemen pemberdayaan masyarakat berkelanjutan memerlukan integrasi antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemberdayaan yang hanya berorientasi pada salah satu dimensi, misalnya ekonomi, terbukti tidak mampu bertahan dalam jangka panjang karena mengabaikan aspek kohesi sosial dan keberlanjutan ekologi. Sebaliknya, program yang menggabungkan ketiga aspek tersebut mampu memberikan manfaat ganda, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan partisipasi komunitas, serta kelestarian lingkungan.

Secara keseluruhan, pendekatan holistic dalam manajemen pemberdayaan masyarakat berkelanjutan yang diusulkan dalam kajian ini menekankan pentingnya pendekatan partisipatif, inovatif, dan integratif. Dengan menghubungkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang, pemberdayaan masyarakat tidak hanya menjadi sarana peningkatan pendapatan, tetapi juga menjadi proses pembentukan komunitas yang inklusif dan ramah lingkungan. Implikasi praktis dari simpulan ini adalah perlunya kerangka manajemen yang mampu diterapkan secara adaptif sesuai konteks lokal, namun tetap selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan global.

Referensi

- Ali Tutupohoa, M. R. S. dkk. (2024). Pemanfaatan Digitalisasi Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Bagi Komunitas Rural Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. *Community Engagement & Emergence Journal*, 5(2), 494–500.
- Amari'a, K. H., & Ulinnuha, R. (2023). Transformasi Kesejahteraan Pelaku UMKM melalui Digitalisasi Pembinaan dalam Program “Sibakul Jogja” di Yogyakarta. *ICODEV: Indonesian Community Development Journal*-, 4(2), 57–68.
- Aqilla, A. R. (2024). Ekonomi Hijau , Menyelamatkan Bumi , Meningkatkan Kesejahteraan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2, 491–494.
- Baskhara, W. E., Amsari, R., Khalil, R. A., & Priatna, P. A. (2023). Kolaborasi Multi Stakeholders Dalam Praktik Corporate Social Responsibility Pada Konservasi Terumbu Karang di Tanjung Kupang. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 15(02), 344–363. <https://doi.org/10.52166/madani.v15i02.4913>
- Djazuli, R. A., & Hidayat, S. I. (2024). *Manajemen agribisnis modern*.
- Dzajuli, R. A. (2024). Evaluasi Program, Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat. *In Ilmiah Kesehatan* (Vol. 2, Issue 1).
- Jubaedah, S., & Fajarianto, O. (2021). Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon. *Abdimas Awang Long*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.56301/awal.v4i1.121>

- Khotimah, H. (2025). Dinamika Kepemimpinan Partisipatif dalam Mengatasi Fragmentasi Sosial di Pesantren. *Visionaria: Journal of Educational ...*, 01(01), 18–34. <https://ejournal.duniakampus.org/index.php/visionaria/article/view/145%0Ahttps://ejournal.duniakampus.org/index.php/visionaria/article/download/145/110>
- Kristiniati, R., & Choiriyah, I. U. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (Pnpm-Mp) Di Desa Bligo Kabupaten Sidoarjo. *Jkmp*, 2(2), 205–220. <https://jkmp.umsida.ac.id/index.php/jkmp/article/view/1612/1817>
- Maulid, Taslim Fait, Abdul Sabaruddin, & La Ode Muhammad Elwan. (2025). Kolaborasi Multistakeholder Dalam Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Kolaka. *Journal Publicuho*, 8(2), 997–1012. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i2.746>
- Mukhzamilah, M., Basri, A., Marsudi, I., Haryudo, S. I., & Haq, M. (2022). Pelatihan Pengembangan Digitalisasi Local Wisdom Berbasis Mobile Apps Sebagai Rintisan Desa Pancasila. *Transformasi Dan Inovasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 136–148. <https://doi.org/10.26740/jpm.v2n2.p136-148>
- Mutmainah, S. (2024). Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mendukung Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Kabupaten Jember. *In Pasca Sarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (Vol. 15, Issue 1).
- Najamudin, F., & Al Fajar, A. H. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal Melalui Pendekatan Abcd Untuk Mencapai Sdg 1: Tanpa Kemiskinan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 7(2), 142–158. <https://doi.org/10.24198/focus.v7i2.58936>
- Naufal, A. R., Ngizudin, R., & Rachdantia, D. (2025). Penerapan Digitalisasi Koperasi dan Pemasaran serta Pendampingan untuk Peningkatan Value Produk UMKM Anggota Koperasi LKMS Kasuwari di Pekalongan Barat. *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 9(1), 140–150. <https://doi.org/10.29407/ja.v9i1.23670>
- Penelitian, J., Pengabdian, D., Masyarakat, K., Putri, D. C., & Irfan, M. (2024). *Strategi Pemberdayaan Umkm Dalam Program Corporate Social Responsibility Pt. Angkasa Pura li*. 5(3), 191.
- Rahmatullah, Achmad Fauzi Kusmin, & Hendrawan. (2023). Studi Literatur: Peran Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Arajang*, 6(1), 49–58. <https://doi.org/10.31605/arajang.v6i1.2804>
- Roseland, M. (2000). Sustainable Community Development: Integrating Environmental, Economic, and Social Objectives. *Progress in Planning*, 54, 73–132. [https://doi.org/10.1016/S0305-9006\(00\)00003-9](https://doi.org/10.1016/S0305-9006(00)00003-9)

- Sodikin, N., I Dewanto, Muliansyah, D., Nurhidayah, R., & Satiadharmanto, D. F. (2025). Penguatan Regulasi Hukum untuk Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Pondok Dayung Jakarta Utara. *Community Empowerment: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 34–41. <https://doi.org/10.15575/commen.v5i1.1300>
- Sujianto, Adiando, As'ari, H., HB, G., Umami, I. M., Habibie, D. K., & Putri, R. A. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pengembangan Potensi Lokal di Desa Kesumbo Ampai. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 5(4), 6352–6359.
- The United Nations Development Program. (2019). *Human Development Report 2019: beyond income, beyond averages, beyond today*. In United Nations Development Program.
- Wijayanti Mala, I., Setianingsih, E. S., & Misnan. (2024). Membangun Kemandirian Ekonomi Lokal Masyarakat Desa Ngale Melalui Pemberdayaan Usaha Bersama Komunitas. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 186(2), 186–200.
- Windasari, M. A., Twicendaru, F., Agustina, H., & Yuliaty, F. (2024). Transformasi Pembangunan Global Dalam Pendekatan Holistik. Prosiding Seminar Sosial Politik, Bisnis, Akuntansi Dan Teknik (SoBAT) Ke-6 Bandung, 21 Desember 2024, 41–52.
- Wulan, R., Wati, J., Munir, M. S., & Wati, S. B. (2025). Pemanfaatan Digital Marketing Dalam Pengembangan Usaha Anggota Binaan Di Koperasi Konsumen Setia Budi Wanita Malang. *Multiple: Journal Global and Multidisciplinary*, 3(7), 5502–5507.
- Yudha, S. A. (2025). Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Melalui Program Usaha Mikro di Desa Maninjau. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 2(4), 977–985.